



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBEBANAN PEMBUKTIAN  
TERBALIK DALAM UNDANG - UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 JO UNDANG -  
UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan penulisan Skripsi  
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
NOROKHMAD  
NPM : 221003742019504

**SEMARANG**

**2026**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBEBANAN PEMBUKTIAN  
TERBALIK DALAM UNDANG - UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 JO UNDANG -  
UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
NOROKHMAD  
NPM : 221003742019504

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

DR. CEPRUDIN, SHI., MH.  
NUPTK : 5536768669130312

Anggota,

DR. SRI PURWANINGSIH, SH.MHUM  
NUPTK : 7459736637230043

Anggota,

DR. EDI PRANOTO, SH.MHUM  
NUPTK : 9744743644130122

Mengetahui  
Dekan,



PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.  
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG  
2026

## ABSTRAK

Tindak pidana korupsi semakin merajalela terjadi yang disertai dengan tidak adanya lagi rasa malu untuk melakukan perbuatan tersebut dikalangan pegawai negeri dan penyelenggara negara, serta semakin tersistematis dan canggihnya perbuatan tersebut dilakukan akhirnya memunculkan pandangan bahwa peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi ini, yaitu UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 diyakini tidak lagi mampu dan efektif untuk diberlakukan. Ketidakmampuan dan ketidak efektifan dari undang-undang tersebut khususnya dalam hal pidana dan pembebanan pembuktian yang diterapkan. Penelitian pada tesis ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penelaahan terhadap bahan-bahan hukum yang bersumber dari data primer, dengan teknik pengumpulan melalui penelusuran kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Kebijakan hukum pidana terhadap sistem pembebanan pembuktian yang dianut oleh undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ini tidak mampu menjawab dan menanggulangi permasalahan pokok yang dihadapi. Dimana permasalahan utama yang dihadapi adalah penyidik dan penuntut umum sangat sulit untuk membuktikan dan mengungkap hal-hal yang menyangkut perkara pokok. Di satu sisi untuk dapat menghukum orang yang didakwakan melakukan tindak pidana korupsi adalah jika perkara pokok benar-benar terbukti. Artinya sistem pembebanan pembuktian yang menganut unsur-unsur dari pengertian pembuktian terbalik yang terdapat dalam pasal 12 B ayat 1 huruf (a) dan (b), pasal 37, pasal 37 A, serta pasal 38 B UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999, hanya sebagai bukti pendukung bila perkara pokok telah terbukti.

**Kata Kunci :** Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Pembebanan Pembuktian

## ABSTRACT

Rampant corruption going on, along with no longer any shame to commit such acts among civil servants and state officials, as well as increasingly sophisticated *tersistematis* and was committed eventually led to the view that the legislation specifically regulating this corruption, the Law No.31 of 1999 Jo Act No.20 of 2001 and is believed to be no longer able to effectively enforced. The inability and ineffectiveness of the law particularly in the imposition of criminal and evidentiary applied. The study on this thesis is a normative law analysis descriptive study by normative juridical approach, i.e a study by a review on any law subjects matters from the primary date by the date collecting method is document study in a library study. The law subject matters from the library research are analyzed by qualitative analysis method. The criminal law policy on the burden of proof system adopted by the law on the eradication of criminal acts of corruption is unable to answer and overcome the main problems faced. Where the main problem faced is that investigators and public prosecutors are very difficult to prove and reveal matters related to the main case. On the one hand, to be able to punish a person accused of committing a criminal act of corruption is if the main case is truly proven. This means that the burden of proof system that adheres to the elements of the definition of reverse proof contained in Article 12 B paragraph 1 letters (a) and (b), Article 37, Article 37 A, and Article 38 B of Law No. 20 of 2001 concerning amendments to Law No. 31 of 1999, only as supporting evidence if the main case has been proven.

**Keywords:** Penal Policy, Corruption, Imposition of Proof

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
2.1 Landasan Teori .....	9
2.2 Pengertian Tindak Pidana .....	9
2.3 Pengertian Korupsi.....	11
2.4 Pengertian Kebijakan Hukum Pidana .....	16
2.5 Pengertian Pembuktian.....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	25
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	25
3.1.1 Jenis Penelitian.....	25
3.1.2 Pendekatan Penelitian .....	27
3.1.3 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	28
3.3 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA</b> .....	32
4.1 Pembebanan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	32

4.2	Pengaturan Pembebanan Pembuktian Dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ....	38
4.3	Kebijakan Hukum Pembebanan Pembuktian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Akan Datang. ....	46
4.4	Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik Merupakan Langkah Preventif dan Represif. ....	52
<b>BAB V PENUTUP</b> .....		59
5.1	Kesimpulan.....	59
5.2	Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		61